

**PENGARUH PELATIHAN, KEJELASAN TUJUAN, DUKUNGAN ATASAN  
TERHADAP KEGUNAAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH DAN  
IMPLIKASINYA TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH DAERAH  
(Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten Lebak)**

**Djoko Suwignyo**

*Pemerintah Kabupaten Lebak*

[djokosuwignyo@gmail.com](mailto:djokosuwignyo@gmail.com)

***Abstract***

*This research is aimed to test the influence of training, goal clarity, supports of top leaders to the usefulness of regional financial accounting system. This research develops theoretical framework as basic hypothesis to answer research questions namely (1) There is influence of training on the usefulness of regional financial accounting system (2) There is influence of goal clarity to the usefulness of regional financial accounting system (3) There is influence of top leaders support to the usefulness of regional financial accounting system (4) There is influence of the usefulness of regional financial accounting system to the performance accountability of government institutions. The research population consists of 32 Local Government Agencies or SKPD in Lebak Regency. This research is quantitative study using survey method conducted to the SKPD's in Lebak regency. The source of data used in this research is primary data. Primary data is data directly taken from respondents. Data analysis method to test hypothesis is Structural Equation Modeling (SEM) analysis using Partial Least Square (PLS). The result of research shows that (1) Training influence positively and significantly to the usefulness of regional financial accounting system (2) Goal Clarity influence positively and significantly to the usefulness of regional financial accounting system (3) Top Leaders Supports influence positively and significantly to the usefulness of regional financial accounting system (4) The usefulness of regional financial accounting system influence positively and significantly to the performance accountability of government institutions.*

***Keywords : Training, Goal Clarity, Top Leaders Support, usefulness of Regional Financial Accounting System, Its Implication on Performance Accountability***

**PENDAHULUAN**

**Latar Belakang Penelitian**

Sistem Akuntansi Pemerintah pada tingkat Pemerintah Daerah diatur dalam Permendagri No 21 tahun 2016 menyatakan bahwa sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi computer. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah merupakan salah satu syarat dan pedoman bagi pemerintah untuk dapat menghasilkan laporan keuangan daerah yang berkualitas.

Pemerintah Daerah selalu berupaya untuk mengintensifkan langkah-langkah pengelolaan keuangan daerah dengan baik guna mencapai *Good Governance*. Salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas keuangan yang dikelolanya adalah dalam bentuk penyampaian laporan keuangan. Beberapa pemerintah daerah di Indonesia telah berusaha untuk membudayakan transparansi di daerahnya dengan membuat Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur khusus mengenai

**PENGARUH PELATIHAN, KEJELASAN TUJUAN, DUKUNGAN ATASAN TERHADAP KEGUNAAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH DAN IMPLIKASINYA TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH**  
(Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten Lebak)

transparansi. Di Indonesia, setidaknya terdapat 12 kabupaten atau kota yang telah memiliki peraturan daerah yang mengatur mengenai transparansi pengelolaan keuangan dan partisipasi masyarakat. Beberapa Kabupaten atau Kota yang telah memiliki peraturan daerah tentang transparansi diantaranya adalah Kabupaten Lebak selaku pengelola dana publik, Pemerintah Daerah harus mampu menyediakan informasi keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu dan dapat dipercaya, sehingga dituntut untuk memiliki sistem informasi yang handal. Oleh karena itu, butuh komitmen yang tinggi segenap jajaran Pemerintah Daerah untuk menerapkan transparansi pengelolaan keuangan. Salah satu bentuk komunikasi pemerintah daerah terhadap masyarakat adalah laporan keuangan yang dihasilkan pemerintah. Laporan keuangan ini merupakan output dari SAKD. SAKD merupakan pendukung terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel efisien dan efektif. Selain penerapan SAKD, keberadaan Aparatur Pemerintah Daerah juga berkontribusi terhadap peningkatan akuntabilitas laporan keuangan. SKPD harus memiliki sumber daya yang kompeten, yang di dukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan dan pengalaman di bidang keuangan. Hal tersebut diperlukan untuk menerapkan sistem akuntansi yang ada. Dapat dikatakan bahwa kualitas aparatur pemerintah daerah berkontribusi terhadap peningkatan akuntabilitas keuangan daerah. Opini BPK merupakan pernyataan professional auditor mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan.

**Tabel 1.1**  
**Opini LKPD TA 2010-2015**  
**BPK RI Perwakilan Provinsi Banten**

No	Entitas Pemerintah Daerah	Opini Tahun 2010	Opini Tahun 2011	Opini Tahun 2012	Opini Tahun 2013	Opini Tahun 2014	Opini Tahun 2015
1	Provinsi Banten	WDP	WDP	WDP	TMP	TMP	WDP
2	Kab Lebak	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP

Sumber : Ihtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS)  
BPK RI Semester II Tahun 2015

Keterangan :

- WTP = Wajar Tanpa Pengecualian.
- WTP DPP = Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas,
- WDP = Wajar Dengan Pengecualian,
- TMP = Tidak Memberikan Pendapat

Objek pada penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Lebak tahun 2010 hingga 2014 telah mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian dan pada tahun 2015 mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK. Dalam Permendagri 59/2007 menambahkan satu ayat dalam pasal 116 ayat (4a) berbunyi, untuk memenuhi asas transparansi, kepala daerah wajib menginformasikan substansi APBD kepada masyarakat yang telah diundangkan dalam lembaran daerah. Mensikapi hal tersebut kemudian Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak menerbitkan lembaran daerah dalam bentuk Perda Kabupaten Lebak Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Salah satu syarat tercapainya transparansi dan akuntabilitas adalah penerapan Sistem Akuntansi dan penerapan Stantar Akuntansi Pemerintah. Betapa pentingnya penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah sehingga pengembangan sistem akuntansi memerlukan suatu perencanaan dan pengimplementasian yang hati hati, untuk menghindari adanya penolakan terhadap sistem yang dikembangkan.

Chenhall (2004) yang dikutip oleh Diana dan yulistia (2017) mengemukakan bahwa faktor organisasi dalam kegunaan sistem ada tiga aspek, meliputi pelatihan, kejelasan tujuan dan dukungan atasan. Penelitaian terdahulu yang dilakukan tentang pengaruh faktor keprilaku organisasi terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah ini pernah dilakukan oleh Yulistia (2017). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa faktor faktor organisasional yang diukur dari kejelasan tujuan tidak berpengaruh signifikan terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah. Hanya dukungan atasan yang berpengaruh signifikan untuk meningkatkan kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah.

Pada tahun 2014 Soleha melakukan penelitian mengenai Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Aktivitas Pengendalian Terhadap Akuntabilitas Keuangan, diperoleh hasil bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah. Berdasarkan uraian diatas penulis ingin membuktikan secara empiris pengaruh pelatihan, kejelasan tujuan, dukungan atasan terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah dan implikasinya terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah. Berdasarkan latar belakang di atas maka akan dilakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pelatihan, Kejelasan Tujuan , Dukungan Atasan terhadap kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Implikasinya terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (Study Empiris pada Pemerintah Kabupaten Lebak).”

## **Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas , permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini antara lain :

1. Apakah Pelatihan berpengaruh terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah
2. Apakah Kejelasan tujuan berpengaruh terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah
3. Apakah Dukungan atasan berpengaruh terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah
4. Apakah Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

## **TINJAUAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

### **Pelatihan**

Pelatihan diarahkan untuk membantu karyawan melaksanakan pekerjaan saat ini secara lebih baik. Teori *Technology Acceptance Model* (TAM), menjelaskan bahwa terdapat dua faktor yang mempengaruhi perilaku personal untuk menerima dan menggunakan teknologi. Dua faktor tersebut adalah kemanfaatan (*usefulness*) dan kemudahan penggunaan (*ease of use*) . Berdasarkan teori ini menggambarkan bahwa pendidikan dan pelatihan perlu untuk diikuti oleh pengguna sistem informasi akuntansi karena program pelatihan dan pendidikan dapat meningkatkan pemahaman individu sehingga individu memahami manfaat yang diberikan atas penggunaan sistem informasi akuntansi tersebut dan memudahkan individu dalam penggunaannya. Menurut Widodo (2015), pelatihan merupakan serangkaian aktivitas individu dalam meningkatkan keahlian dan pengetahuan secara sistematis sehingga mampu memiliki kinerja yang profesional di bidangnya. Pelatihan adalah proses pembelajaran yang memungkinkan pegawai melaksanakan pekerjaan yang sekarang sesuai dengan standar.

Secara garis besar ada empat hal yang biasanya dijadikan sebagai tolok ukur keberhasilan sebuah program pelatihan yaitu :

(a) Reaksi, mengevaluasi bagaimana reaksi orang yang dilatih terhadap program (b) Pembelajaran, melakukan pengujian terhadap sesuatu yang telah dipelajari sesuai dengan prinsip, keterampilan dan fakta yang seharusnya (c) Perilaku, melihat kembali bagaimana perilaku seseorang yang telah menyelesaikan pelatihan (d) Hasil, mengevaluasi keseluruhan dari hasil akhir setelah dilakukannya pelatihan. Pelatihan berkaitan dengan implementasi, desain dan kegunaan SAKD yang dapat memberikan mekanisme bagi pengguna untuk memahami dan menerima dasar dari SAKD. Pendidikan dan pelatihan penting untuk meningkatkan kemampuan personal dalam penggunaannya karena Sistem Akuntansi yang bagus tanpa pengguna yang kompeten tidak akan memberikan hasil yang bagus. Pelatihan yang efektif dan sukses akan membentuk pandangan serta cara berfikir karyawan menjadi sesuai dengan visi ataupun misi organisasi. Selain itu pelatihan yang efektif dan sukses bisa menjadikan kompetensi seperti pengetahuan, sikap, perilaku, dan pengetahuan karyawan meningkat. Agar bisa mengetahui apakah pelatihan yang sudah dilakukan efektif dan sukses perlu dilakukan evaluasi. Dengan melakukan evaluasi maka dapat diketahui ketepatan dan efektivitas pelatihan karyawan yang sudah dilakukan. Model yang paling dikenal dan sudah digunakan bertahun-tahun untuk melakukan pengukuran efektivitas dari suatu pelatihan adalah yang seperti yang dicetuskan oleh Donald Kirkpatrick. Banyak orang telah membuat modifikasi dari model Kirkpatrick tetapi esensinya tetap sama. Struktur model pengukuran ala Kirkpatrick ada empat tahapan. Biasanya tahapan dimulai

dari yang terendah hingga ke level yang tertinggi, tapi untuk model Kirkpatrick kita bahas dari level yang tertinggi terlebih dahulu baru turun ke level yang lebih rendah.

**Pengukuran Level 4**

Membahas tentang hasil yang diperoleh dari suatu program pelatihan. Apa manfaat terukur yang diperoleh bagi organisasi dari diadakannya suatu program pelatihan. Pengukuran yang dilakukan berkaitan dengan produktivitas, efisiensi, apakah produktivitas karyawan semakin bertambah baik setelah mengikuti program pelatihan?

**Pengukuran Level 3 – Perilaku**

Apabila pengukuran level 4 tidak membuahkan hasil, artinya tidak sampai memberikan pengaruh apa-apa pada level ini maka pengukuran diturunkan ke level ketiga. Sejauh mana peserta pelatihan dapat berubah perilakunya setelah kembali dari mengikuti suatu program pelatihan? Penekanannya adalah pada perubahan perilaku setelah dilatih. Untuk melihat perubahan perilaku ini maka ada beberapa hal yang harus dilakukan. Peserta pelatihan diminta untuk mengisi suatu kuesioner tentang keadaan dirinya. Selain itu juga perlu ada pengamatan langsung di lapangan untuk melihat apakah memang ada perubahan perilaku terhadap para karyawan yang sudah dilatih.

**Pengukuran Level 2 – Pembelajaran**

Jika perubahan perilaku tidak terjadi, maka pengukuran diturunkan lagi levelnya menjadi level 2. Sejauh mana peserta pelatihan dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilannya, sikap mentalnya sebagai akibat dari pelatihan? Indikator dari pembelajaran ini dapat dilihat dari tes yang dilakukan sebelum dan sesudah pelatihan. Pembelajaran bisa juga dilihat dari penilaian langsung di tempat kerja, apakah ada tambahan pengetahuan yang terlihat dari cara karyawan melaksanakan tugas dalam pekerjaannya.

**Pengukuran Level 1 – Reaksi.**

Apabila pelatihan tidak lolos pada pengukuran level 4, 3, dan 2 maka inilah pengukuran terendah yang dapat diterapkan pada program pelatihan yang bersangkutan. Sejauh mana para peserta merasakan bahwa pelatihan itu bermanfaat, menantang, terstruktur, dan rapi? Peserta pelatihan diminta memberikan umpan balik. Selain diminta menjawab daftar pertanyaan, peserta juga diminta untuk memberikan komentar. Juga dilakukan diskusi dengan peserta untuk melihat reaksi mereka terhadap manfaat pelatihan.

## **Kejelasan Tujuan**

Tujuan harus jelas terukur, tidak ambigu, dan ada jangka waktu tertentu yang ditetapkan untuk penyelesaian tugas. Orang menjadi tidak fokus, kejelasan tujuan akan sangat mempengaruhi kejelasan tugas dan tanggung jawab, fokus, energi dan gairah yang memungkinkan orang mengerahkan segala sumber daya untuk mencapai tujuan. Kejelasan tujuan didefinisikan sebagai kejelasan dari sasaran dan tujuan digunakannya Sistem Akuntansi Keuangan Daerah di semua level organisasi. Kejelasan tujuan dapat menentukan suatu keberhasilan sistem karena individu dengan suatu kejelasan tujuan, mereka dapat melaksanakan tugas dengan ketrampilan dan kompetensi yang dimiliki. Kejelasan tujuan dalam organisasi pemerintah dapat terlihat dari visi dan misi organisasi terkait.

Untuk mengukur kejelasan tujuan maka digunakan indikator sebagai berikut:

(1) Transparansi sasaran yaitu keterbukaan di dalam instansi kepada setiap anggota organisasi tentang adanya sebuah tujuan yang harus dicapai (2) Perencanaan yaitu rangkaian kegiatan atau prosedur yang dapat dilakukan karyawan dalam mencapai tujuan (3) Target yaitu standar sasaran yang dibebankan kepada masing-masing anggota organisasi (4) Pengawasan yaitu proses pengamatan yang dilakukan manajemen terhadap anggota organisasi dalam mencapai tujuan (5) Sanksi yaitu hukuman yang diberikan kepada karyawan yang tidak bekerja sesuai dengan prosedur atau standar yang diharuskan Instansi. Kejelasan tujuan memberikan gambaran ketika akan mengimplementasikan SAKD, tujuan implementasi sistem tersebut harus jelas dan ringkas, dan telah ada persetujuan tentang tujuan implementasi SAKD, serta SAKD bermanfaat untuk semua bagian dalam departemen/dinas. Dalam beberapa penelitian menunjukkan bahwa faktor perilaku mengenai kejelasan daripada tujuan sistem akan dapat memberikan kemudahan selama implementasi dan akan meningkatkan kegunaan sistem. Sementara Nanda Rakhmata Sari (2017), berpendapat bahwa kejelasan tujuan dapat menentukan suatu

keberhasilan sistem karena individu dengan suatu kejelasan tujuan, target yang jelas dan faham bagaimana mencapai tujuan, mereka dapat melaksanakan tugas dengan ketrampilan dan kompetensi yang di miliki.

Penerimaan tujuan (*goal acceptance*) merupakan prasyarat (*prerequisite*) yang penting bagi adanya dampak positif terhadap tujuan organisasi. Sumber-sumber yang dapat digunakan untuk menentukan atau mengidentifikasi kategori kinerja, adalah visi dan misi strategis organisasi. Komitmen pada organisasi merupakan dimensi perilaku yang penting yang dapat digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi kekuatan individu dalam bertahan dan melaksanakan tugas dan kewajibannya pada suatu organisasi, dimana dengan mengetahui komitmen yang dimiliki ini organisasi dapat menentukan arah kebijaksanaannya dengan modal sumber daya manusia yang tangguh dan berdaya guna. Salah satunya adalah dengan melihat kejelasan tujuan (*goal clarity*) yang dimiliki oleh para anggota organisasi. *Goal clarity* adalah taraf atau derajat kepehaman individu mengenai pekerjaan individu yang dinyatakan dengan jelas dan didefinisikan dengan baik sehingga mempermudah individu dalam melaksanakan pekerjaan sebagai pengarah motivasi yang efektif.

### **Dukungan Atasan**

Pegawai merupakan sumber daya yang mempunyai peranan penting dalam organisasi, karena mereka terlibat langsung dalam menjalankan kegiatan organisasi. Mereka memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap yang sangat dibutuhkan untuk menggerakkan organisasi, Oleh sebab itu organisasi harus memberikan perhatian secara maksimal pada pegawainya, baik perhatian dari segi peningkatan kualitas pengetahuan, keterampilan, dan sikapnya, sehingga pegawai yang bersangkutan dapat terdorong untuk meningkatkan kemampuannya dan memberikan segala kemampuan tersebut untuk kebutuhan organisasi. Peningkatan kemampuan pengetahuan, keterampilan dan sikap pegawai tersebut dapat dilakukan melalui dukungan atasan. Penggunaan sistem informasi akuntansi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah berperan dalam memudahkan karyawan untuk pemrosesan data agar lebih praktis. Keberadaan sistem informasi akuntansi yang layak akan membantu dalam menghasilkan laporan secara cepat, akurat, dan relevan sehingga dapat berguna dalam pengambilan keputusan. Keterlibatan manajemen puncak dalam kesuksesan implementasi SAKD merupakan hal yang sangat penting. Keterlibatan tersebut diharapkan akan membawa penggunaan SAKD secara efektif. Tingkat dukungan yang diberikan oleh manajemen puncak bagi SAKD dapat menjadi suatu faktor yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan semua kegiatan yang berkaitan dengan SAKD.

### **Sistem Akuntansi Keuangan Daerah**

Menurut Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 yang dimaksud dengan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah daerah. Menurut Mahmudi (2016) Prosedur dalam sistem akuntansi keuangan daerah merupakan serangkaian tahap dan langkah yang harus dilalui dalam melakukan fungsi akuntansi tertentu. Sistem akuntansi pemerintah daerah dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), sedangkan sistem akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilakukan oleh PPK-SKPD. Menurut Erlina (2015) mengatakan bahwa: Sistem akuntansi keuangan daerah adalah sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berterima umum. Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang relevan, handal, dan dapat dipercaya, dapat diberikan sebuah penjelasan tentang pengukuran kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah yaitu :

1. Validity, informasi yang dihasilkan dalam sistem akuntansi yang digunakan memiliki kandungan akurasi yang tinggi.
2. Reliability, informasi yang dihasilkan dalam sistem informasi adalah informasi yang dapat dipercaya.
3. Efisien, melalui sistem informasi yang digunakan anggota organisasi dapat menghemat penggunaan biaya.

4. Efektif, melalui sistem informasi yang digunakan anggota organisasi dapat memanfaatkan waktu secara optimal.

### **Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

Kata akuntabilitas berasal dari bahasa Inggris *accountability* yang berarti keadaan yang dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Tim Studi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BPKP, akuntabilitas adalah perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan atas pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban secara periodik. Karena itu aparatur pemerintah harus mempertanggungjawabkan seluruh aktivitas dan pelaksanaan kerjanya kepada publik. Dalam konteks organisasi pemerintahan sendiri, akuntabilitas publik merupakan pemberian informasi atas aktivitas dan kinerja pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Penekanan utama akuntabilitas publik adalah pemberian informasi kepada publik dan konstituen lainnya yang menjadi pemangku kepentingan (*stakeholder*).

Menurut Sutrisno (2016) menjelaskan tentang kinerja adalah kesuksesan seseorang dalam melaksanakan tugas hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggungjawab masing masing atau tentang bagaimana seseorang diharapkan dapat berfungsi dan berperilaku sesuai dengan tugas yang telah dibebankan kepadanya serta kualitas, kuantitas dan waktu yang digunakan dalam menjalankan tugas. Dapat dijelaskan Indikator kinerja yang dimaksud oleh LAN-RI adalah ukuran kualitatif atau kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau suatu tujuan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan Indikator masukan (*inputs*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator ini dapat berupa dana, sumber daya manusia, informasi, dan kebijakan atau peraturan perundang-undangan. Indikator keluaran (*outputs*) adalah sesuatu yang dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan atau non fisik. Indikator hasil (*outcomes*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Indikator manfaat (*benefits*) adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan. Indikator dampak (*impacts*) adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif pada setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang ditetapkan. Wibowo (2015) menjelaskan bahwa Pengukuran terhadap kinerja perlu dilakukan untuk mengetahui apakah selama pelaksanaan kinerja terdapat deviasi dari rencana yang telah ditentukan, atau apakah kinerja dapat dilakukan sesuai jadwal waktu yang ditentukan, atau apakah hasil kinerja telah tercapai sesuai dengan yang diharapkan.

### **Pengembangan Hipotesis**

#### **Pengaruh Pelatihan Terhadap Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)**

Pelatihan dalam Nanda Rakhmata Sari (2017) menuliskan bahwa Pelatihan adalah kegiatan dari manajemen sumber daya manusia yang bertujuan meningkatkan prestasi kerja karyawan sesuai dengan kebutuhan organisasi dan individu. Secara umum dapat dikatakan tujuan suatu pelatihan diarahkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi serta untuk menjembatani kesenjangan antara pengetahuan, keterampilan serta sikap karyawan yang ada dan diharapkan baik pada masa sekarang maupun pada masa yang akan datang disesuaikan dengan kebutuhan individu maupun kebutuhan organisasi.

Hendra Santa dan Eka Damayanti (2018) menyatakan bahwa pelatihan berpengaruh positif terhadap kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. Pernyataan tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Caecilia Henny dan Samuel (2015) yang menyatakan bahwa pelatihan berpengaruh positif terhadap kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. Berdasarkan beberapa hasil penelitian yang diuraikan di atas maka dapat disimpulkan bahwa pelatihan berpengaruh positif

terhadap kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan dapat disusun hipotesis untuk penelitian ini sebagai berikut :

**H<sub>1</sub> : Pelatihan berpengaruh positif terhadap kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.**

### **Pengaruh Kejelasan Tujuan Terhadap Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)**

Secara sederhana dalam kaitannya dengan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah kejelasan tujuan dapat didefinisikan sebagai kejelasan dari sasaran dan tujuan digunakannya Sistem Akuntansi Keuangan Daerah disemua level organisasi. Dalam beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa faktor perilaku mengenai kejelasan daripada tujuan sistem akan dapat memberikan kemudahan selama implementasi dan akan meningkatkan kegunaan sistem. Dalam penelitiannya Shoffiyatuz Zahro (2013) menyatakan bahwa terdapat pengaruh tentang kejelasan tujuan terhadap kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Cyntia (2013) tentang pengaruh kejelasan tujuan menunjukkan bahwa kejelasan tujuan berpengaruh signifikan positif terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah. Yulistia, Novi Yanti, Ika Purwasih (2017) dalam penelitiannya menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh tentang kejelasan tujuan terhadap kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. Berdasarkan uraian pendapat dari beberapa hasil penelitian di atas masih terdapat perbedaan hasil penelitian mengenai pengaruh kejelasan tujuan terhadap kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dengan demikian hal tersebut masih cukup menarik untuk dilaksanakan penelitian kembali terkait pengaruh kejelasan tujuan terhadap kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah . Hipotesis untuk penelitian ini sebagai berikut :

**H<sub>2</sub> : Kejelasan tujuan berpengaruh positif terhadap kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.**

### **Pengaruh Dukungan Atasan Terhadap Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)**

Untuk teknologi tinggi keberartian dukungan atasan akan memberi kesempatan pada karyawan membuat perbedaan pada pekerjaan, mencoba keterampilan baru dan menerima umpan balik pada kinerja (Bashir dan Naqvi, 2015). Peran atasan menunjukkan sejauh mana atasan memberi dorongan dan motivasi pada karyawannya dalam meningkatkan potensi diri dan menerapkan kemampuan karyawan ke dalam tempat kerja. Tujuan dan inisiatif strategi yang direncanakan apabila manajer (atasan) mendukung sepenuhnya dalam implementasi sistem baru, jika di suatu instansi pemerintahan tidak adanya dukungan manajemen puncak maka tujuan instansi pemerintahan tidak akan tercapai. Aditya Putranto (2014) Dalam penelitiannya di Surakarta menyatakan bahwa dukungan atasan berpengaruh terhadap kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. Yulistia, Novi Yanti, Ika Purwasih (2017) dalam penelitiannya di Sumatra Barat Padang senada memberikan hasil yang sama bahwa dukungan atasan berpengaruh terhadap kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. Dari beberapa penelitian tersebut dapat dijadikan dasar untuk membangun hipotesis sebagai berikut:

**H<sub>3</sub> : Dukungan atasan berpengaruh positif terhadap kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD).**

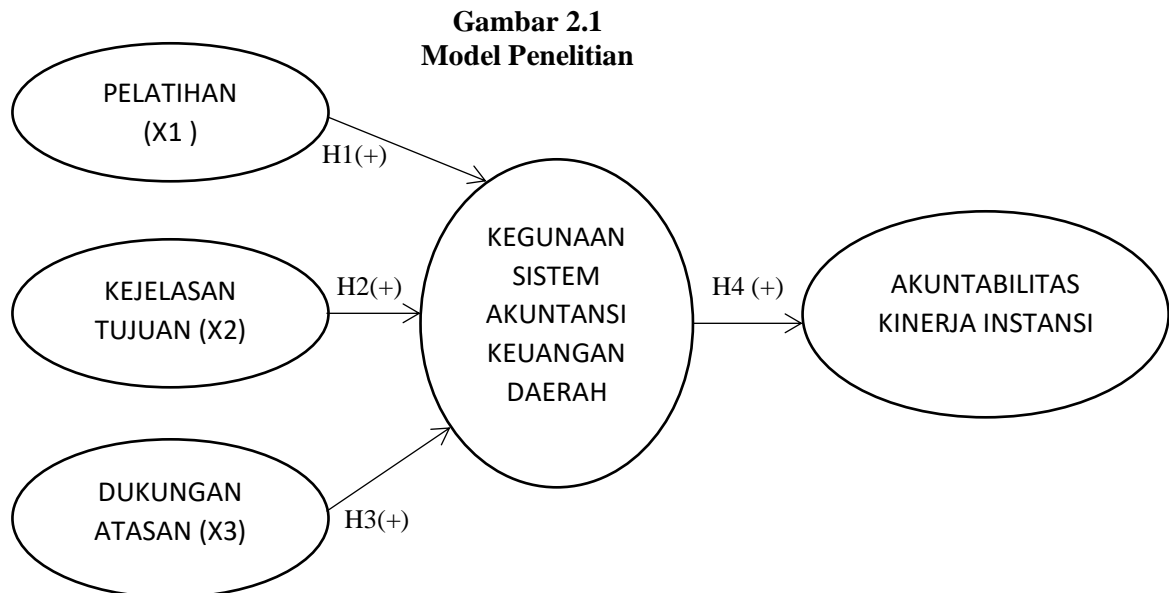
### **Pengaruh Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

Terkait reformasi pengelolaan keuangan daerah adalah adanya penggunaan akuntansi dalam pengelolaan keuangan daerah . Penggunaan akuntansi dalam pengelolaan keuangan daerah diperlukan untuk menghasilkan laporan keuangan yang dapat diaudit (*auditable*) sehingga memudahkan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam hal transparansi pengelolaan keuangan. Dengan diterapkannya sistem akuntansi akan meningkatkan kualitas laporan keuangan yang merupakan akuntabilitas pemerintah daerah semakin baik sehingga meningkatnya *good governance*. Perubahan dalam pengelolaan keuangan negara yang terkandung dalam undang-undang tersebut adalah dalam hubungannya dengan tuntutan akuntabilitas dan transparansi. Penelitian yang terkait dengan penerapan sistem akuntansi telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya diantaranya Diana Nova Lintong, David Paul Elia Saerang, Ventje Ilat (2017) menyatakan bahwa

Sistem Akuntansi berpengaruh signifikan dan searah/positif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah pada Pemerintah Kota Kotamobagu. Dari penelitian tersebut dapat dijadikan dasar untuk membangun hipotesis sebagai berikut:

**H<sub>4</sub> : Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.**

Dari rumusan masalah tersebut di atas, maka dapat dibuat kerangka pemikiran penelitian seperti berikut :



Sumber : Yulistia, Yanti, Purwasih (2017) ; Fathia (2017)

## METODE PENELITIAN

### Jenis dan Tempat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode survey yang dilakukan pada SKPD yang berada di Kabupaten Lebak . Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti melalui kuesioner yang ditujukan kepada responden dengan tujuan untuk memperoleh fakta dan keterangan faktual dari responden. Kuesioner akan diantarkan langsung kepada responden yaitu staf pegawai pengelola keuangan (bendahara dan Kepala Bidang Keuangan )pada SKPD Kabupaten Lebak.

### Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

1. Variabel Dependen

Dalam penelitian ini yang termasuk dalam variabel Dependen adalah Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah .Skala yang digunakan adalah skala Likert lima point.

2. Variabel Independen

Dalam penelitian ini yang termasuk variabel independen adalah faktor berperilaku yang meliputi: Pelatihan, Kejelasan Tujuan dan Dukungan Atasan

3. Operasionalisasi Variabel

Dalam operasionalisasi variable, masing-masing variable diuraikan definisi operasionalnya. Definisi operasional dari masing-masing variable penelitian ini adalah sebagai berikut :



**Tabel 1.2**  
**Operasionalisasi Variabel**

Variabel	Definisi	Indikator	Skala
Pelatihan (X1) Sumber: (Lyna atifah dan Arifin Sabeni,2007)	Pelatihan adalah kegiatan dari manajemen sumber daya manusia yang bertujuan meningkatkan prestasi kerja pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi dan individu	1.Cara-cara kerja spesifik	Ordinal
		2.Berbagai bidang ketrampilan kerja dipunyai pimpinan	
		3.Pelaksanaan pengembangan kemampuan	
		4.Tanggapan prestasi kerja	
		5.Jenis Pelatihan yang diberikan	
		6.Fasilitas pelatihan	
		7.Jenis Pelatihan	
		8.Peserta pelatihan	
		9.Pelatihan penerapan sistem baru	
Kejelasan Tujuan (X2) Sumber: (Lyna atifah dan Arifin Sabeni,2007)	Tujuan harus jelas terukur, tidak ambigu, dan ada jangka waktu tertentu yang ditetapkan untuk penyelesaian tugas.	1.Tugas-tugas yang diberikan	Ordinal
		2.Definisi tujuan pekerjaan	
		3.Penjelasan tujuan oleh pimpinan Organisasi	
		4.Pengetahuan tujuan organisasi	Ordinal
		5.Sasaran tujuan	
		6.Tingkat sasaran organisasi yang ingin dicapai	
Dukungan Atasan (X3) Sumber: (Lyna atifah dan Arifin Sabeni,2007)	Dukungan atasan diartikan sebagai keterlibatan manajer dalam kemajuan organisasi dan menyediakan sumber daya yang diperlukan, selain itu dapat diartikan juga sebagai bantuan yang diberikan oleh pimpinan yang lebih tinggi kepada bawahan untuk mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai,	1.Dukungan atasan terhadap keputusan yang dibuat	Ordinal
		2.Kepatuhan dan loyalitas	
		3.Penekanan prestasi kerja	
		4.Kebebasan berpendapat	
		5.Kepercayaan atasan Kepada bawahan	
		6.Kebebasan berinisiatif	
		7.Kesediaan atasan ber diskusi dengan bawahan	
		8.Perhatian atasan atas masalah yang dihadapi bawahan	
		9.Dukungan atasan kepada bawahan	
		10.Kebebasan cara kerja	
Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (Y) Sumber: (Lyna atifah dan Arifin Sabeni,2007)	Serangkaian prosedur yang dapat dilakukan secara manual ataupun menggunakan bantuan computer yang mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan berakhir pada pelaporan keuangan yang dilakukan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.  Permendagri No 13 Pasal 232,2006 :76	1.Kronologis bukti transaksi	Ordinal
		2.Perioderisasi buku besar	
		3.Laporan keuangan disusun oleh PPK- SKPD, Laporan berupa LRA, Neraca, CALK.	
		4.Paling lambat Laporan Realisasi Semester I diserahkan ke PPKD tidak lebih dari 10 hari setelah semester pertama tahun anggaran terakhir.	
		5.Penggunaan Sumber Daya secara efisiensi dan efektif .	
		6.Prosedur antara keuangan yang ada tidak bertentangan dengan Permendagri No. 13 Tahun 2006 dan Permen dagri No. 59 tahun 2007 serta Prosedur yang di- susun Pejabat berwe- nang daerah/ perda.	
		7.Laporan Keuangan yang baik mencerminkan tatakelola pemerintahan yang baik	
		8.Laporan keuangan yang disusun telah ber- dasarkan Permendagri tentang pedoman	

**PENGARUH PELATIHAN, KEJELASAN TUJUAN, DUKUNGAN ATASAN TERHADAP KEGUNAAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH DAN IMPLIKASINYA TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH**  
(Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten Lebak)

		penge ngelolaan keuangan daerah	
Akuntabilitas Kinerja (Z) Sumber Priyanto Adji, 2013	Perwujudan kewajiban mempertanggungjawabkan pelaksanaan misi organisasi yang telah ditetapkan	1.Keterkaitan program dan kebijakan.	Ordinal
		2.Dimengerti oleh semua aparat dan pemimpin	
		3.Kegiatan dikontrol dengan ukuran	
		4.Program yang disusun Sesuai tuntutan masyarakat	
		5.Kegunaan LAKIP	

### Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah mereka yang terlibat dalam pembuatan laporan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Lebak yang berjumlah 32 SKPD. Responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah mereka yang terlibat dalam pembuatan laporan pada setiap SKPD di Kabupaten Lebak yang diwakili oleh bendahara dan Kasubag keuangan. Peneliti mengasumsikan setiap SKPD menyerahkan 2 kuisisioner, dengan adanya jumlah SKPD sebanyak 32 SKPD, maka yang akan diteliti sebanyak 64 responden.

### Metode Analisis Data

Analisis data adalah bagian dari poses pengujian data setelah data dikumpulkan dan dipilih untuk diuji. Penelitian ini menggunakan metode analisis data dengan menggunakan software *SmartPLS versi 2.0.m3* yang dijalankan dengan media komputer. PLS (*Partial Least Square*) merupakan analisis persamaan struktural (SEM) berbasis varian yang secara simultan dapat melakukan pengujian model pengukuran sekaligus pengujian model struktural. Model pengukuran digunakan untuk uji validitas dan reabilitas, sedangkan model struktural digunakan untuk uji kausalitas (pengujian hipotesis dengan model prediksi).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Pengujian Kualitas Data

#### Uji Validitas

**Tabel 1.3**  
*Average Variance Extracted (AVE)*

Variable	Average Variance Extracted (AVE)	Keterangan
Pelatihan	0.614	<i>Valid</i>
Kejelasan Tujuan	0.673	<i>Valid</i>
Dukungan Atasan	0.591	<i>Valid</i>
Kegunaan SAKD	0.714	<i>Valid</i>
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	0.721	<i>Valid</i>

Sumber : *Output Smart PLS (2019)*

Tabel menjelaskan nilai dari AVE dan akar AVE dari konstruk pelatihan, kejelasan tujuan, dukungan atasan, kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dapat dilihat bahwa setiap konstruk (variabel) tersebut memiliki nilai AVE diatas 0,5. Hal ini menunjukkan bahwa setiap konstruk memiliki nilai validitas yang baik dari setiap indikatornya atau kuesioner yang digunakan untuk menggambarkan variable pelatihan, kejelasan tujuan, dukungan atasan, kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah dan kinerja instansi pemerintah dapat dikatakan tepat.

## Uji Reliabilitas

**Tabel 1.4**  
**Cronbachs Alpha**

Variable	Cronbachs Alpha	Composite Reliability	Keterangan
Pelatihan	0.921	0.934	Realibel
Kejelasan Tujuan	0.902	0.925	Realibel
Dukungan Atasan	0.921	0.934	Realibel
Kegunaan SAKD	0.942	0.952	Realibel
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	0.902	0.927	Realibel

Sumber : *Output SmartPLS (2019)*

Tabel menjelaskan tentang nilai *Cronbachs Alpha* dari setiap variabel yang diteliti dalam penelitian ini. Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa nilai *Cronbachs Alpha* variabel Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah sebesar 0,942 lebih besar dari standard nilai reabilitas suatu konstruk yakni 0,60/ Nilai Cronbachs Alpha variabel.

## Uji Normalitas

**Tabel 1.5**  
**Statistik Deskriptif**

Variable	Mean	Std Deviasion
Pelatihan	3.84	0.71
Kejelasan Tujuan	3.89	0.66
Dukungan Atasan	3.76	0.65
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	4.17	0.69
Kinerja Instansi Pemerintah	4.16	0.66

Sumber: Data Primer yang diolah (2019)

Tabel menjelaskan statistik deskriptif variable-variabel yang diteliti dalam penelitian ini. Berdasarkan table, diketahui bahwa nilai rata-rata(*mean*) variabel pelatihan, kejelasan tujuan, dukungan atasan, sistem akuntansi keuangan daerah dan kinerja instansi pemerintah lebih besar dari nilai standard deviasinya sehingga sebaran jawaban responden tidak bias, Selain itu, tabel tersebut juga menjelaskan bahwa jawaban responden beragam.

## Pembahasan

**Tabel 1.6**  
**R-Square**

	R-square
Pelatihan	
Kejelasan Tujuan	
Dukungan Atasan	
Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	0.813
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	0.807

Sumber: Data Primer yang diolah (2019)

**Tabel 1.7**  
*Path Coefficients (Mean, STDEV, T-Values)*

Hipotesis	Original Samples	T-Statistik	Keterangan
PEL -> SAKD	0.294	5.158	Diterima
KT -> SAKD	0.513	9.492	Diterima
DA -> SAKD	0.127	2.780	Diterima
SAKD -> KIP	0.898	63.718	Diterima

Sumber : *Output SmartPLS (2019)*

### **Pengaruh pelatihan terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah.**

Konstruk pelatihan memiliki nilai koefisien jalur terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah sebesar 0,294 dengan arah hubungan positif. Nilai T-statistik hubungan antara pelatihan dan kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah sebesar 5,158 > 1,96( $\alpha$  5%). Berdasarkan hasil pengujian tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pelatihan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah.

Pelatihan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah. Hal ini disebabkan tujuan dari adanya pelatihan adalah untuk meningkatkan produktivitas, meningkatkan kualitas, mencegah kadaluarsa kemampuan dan pengetahuan personel, meningkatkan kemampuan dan keahlian personel. Pelatihan diarahkan untuk membantu karyawan melaksanakan pekerjaan saat ini secara lebih baik. Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa pelatihan perlu untuk diikuti oleh pengguna sistem informasi akuntansi karena program pelatihan dapat meningkatkan pemahaman individu sehingga individu memahami manfaat yang diberikan atas penggunaan sistem informasi akuntansi tersebut dan memudahkan individu dalam penggunaannya. Transfer pelatihan terjadi jika para peserta pelatihan menerapkan dan mempertahankan secara berkesinambungan hasil pelatihan di tempat kerja. Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa di setiap SKPD di lingkungan Kabupaten Lebak sejak diterbitkannya Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah secara periodik diadakan pelatihan berkaitan dengan penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

### **Pengaruh kejelasan tujuan terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah.**

Nilai koefisien jalur hubungan antara kejelasan tujuan terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah adalah sebesar 0,513. Sementara itu, nilai T-statistik hubungan kejelasan tujuan terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah adalah sebesar 9,492 > 1,96( $\alpha$  5%). Sehingga dapat disimpulkan bahwa kejelasan tujuan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah.

Kejelasan tujuan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah. Hal ini disebabkan kejelasan tujuan dapat menentukan suatu keberhasilan sistem karena individu dengan suatu kejelasan tujuan, mereka dapat melaksanakan tugas dengan ketrampilan dan kompetensi yang dimiliki. Kejelasan tujuan dalam organisasi pemerintah dalam hal ini SKPD di lingkungan Kabupaten Lebak dapat terlihat dari visi dan misi. Kejelasan tujuan memperlihatkan transparansi di dalam sebuah organisasi, yang memperlihatkan alur yang harus dicapai seluruh anggota organisasi dalam bekerja. Kejelasan tujuan memperlihatkan keseriusan sebuah SKPD di lingkungan Kabupaten Lebak dalam mencapai visi demi terjaganya eksistensi SKPD dimasa depan. Kejelasan tujuan memberikan gambaran ketika akan mengimplementasikan kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. Kejelasan tujuan dapat menentukan keberhasilan sistem karena individu dengan kejelasan tujuan, target yang jelas dan faham bagaimana mencapai tujuan, mereka dapat melaksanakan tugas dengan ketrampilan dan kompetensi yang dimiliki. Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa di setiap SKPD di lingkungan Kabupaten Lebak sejak diterbitkannya Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah dihimbau untuk menampilkan visi misi dan capaian target di halaman muka SKPD sehingga siapapun yang datang dapat melihatnya. Kejelasan tujuan menjadi pendekatan yang mumpuni untuk memotivasi pegawai agar meningkatkan efektifitas penggunaan sistem informasi akuntansi. Karena dalam organisasi

kejelasan tujuan seringkali menjadi penentu keberhasilan suatu sistem, dengan memahami kejelasan tujuan organisasinya, seseorang dapat memaksimalkan penggunaan ketrampilan dan kompetensi yang dimiliki guna mencapai tujuan yang diinginkan.

### **Pengaruh dukungan atasan terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah.**

Tabel menjelaskan tentang hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan metode *SEM-PLS (Partial Least Square)*. Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa variabel dukungan atasan berpengaruh positif 0,127 terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah. Selain itu, nilai T-statistik hubungan antara dukungan atasan terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah sebesar  $2,780 > t\text{-tabel } 1,96 (\alpha 5\%)$ . Sehingga dapat disimpulkan bahwa dukungan atasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah.

Dukungan atasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah. Peran atasan menunjukkan sejauh mana atasan memberi dorongan dan motivasi pada semua pegawainya dalam meningkatkan potensi diri dan menerapkan segenap kemampuan dan potensi semua pegawainya ke dalam tempat kerja dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dukungan atasan memegang peranan penting dalam setiap siklus pengembangan sistem dan dengan adanya dukungan manajemen puncak berarti atasan terlibat secara langsung dalam kemajuan proyek dan menyediakan sumber daya yang diperlukan dalam menentukan efektifitas kegunaan sistem informasi keuangan daerah. Dengan adanya keterlibatan atasan dalam kemajuan organisasi dan menyediakan sumber daya yang diperlukan dapat dikatakan bahwa dampak positif dari dukungan manajemen puncak dapat diketahui dari (1) sejauh mana atasan dapat memahami pentingnya fungsi sistem informasi dan turut serta dalam kegiatan sistem informasi (2) Keterlibatan atasan dalam mendalami fungsi untuk berkolaborasi dengan sistem informasi secara profesional (3) Mempertimbangkan sistem sebagai sumber daya strategis dan menjadikannya sebagai peluang yang ditawarkan Keterlibatan manajemen puncak dalam kesuksesan implementasi SAKD merupakan hal yang sangat penting. Keterlibatan tersebut diharapkan akan membawa penggunaan SAKD secara efektif.

### **Pengaruh kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.**

Variabel kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif sebesar 0,898 terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sehingga semakin optimal pemanfaatan sistem akuntansi keuangan daerah maka semakin baik akuntabilitas kinerja pemerintah. Di sisi lain, nilai t-statistik hubungan antara kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah sebesar  $63,718 > 1,96$  pada  $\alpha = 5\%$ . Oleh sebab itu kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas instansi pemerintah.

Kegunaan sistem akuntansi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sistem akuntansi sangat diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam pelaporan keuangan dan dapat dijadikan pedoman dalam menyajikan informasi yang diperlukan berbagai pihak untuk berbagai kepentingan (*general purposes financial statements*), karena sistem akuntansi memberikan landasan tentang prosedur, teknik, dan metode yang layak untuk merekam segala peristiwa penting kegiatan pemerintah. Hasilnya terbukti bahwa implementasi sistem akuntansi keuangan daerah memberikan manfaat dan kemudahan bagi pemda dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan posisi keuangan pada tanggal tertentu kepada para penggunanya dalam rangka pengambilan keputusan. Akuntabilitas Kinerja SKPD Kabupaten Lebak adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik yang terdiri dari berbagai komponen yg merupakan suatu kesatuan yaitu perencanaan strategik, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja. SKPD di lingkungan Kabupaten Lebak selaku pengelola dana harus mampu menyediakan informasi keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu dan dapat dipercaya. Dengan diterapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) diharapkan akan

meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara melalui Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) guna mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*).

### **SIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan rumusan masalah, pengembangan hipotesis atas dasar teori-teori yang berhubungan, serta hasil analisis yang telah dibahas, maka penulis menarik simpulan sebagai berikut :

1. Pelatihan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah. Pelatihan adalah kegiatan dari manajemen sumber daya manusia yang bertujuan meningkatkan prestasi kerja karyawan sesuai dengan kebutuhan organisasi dan individu.
2. Kejelasan tujuan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah. Kejelasan tujuan dapat menentukan suatu keberhasilan sistem karena individu dengan suatu kejelasan tujuan, target yang jelas dan paham bagaimana mencapai tujuan, mereka dapat melaksanakan tugas dengan keterampilan dan kompetensi yang di miliki.
3. Dukungan atasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah. Dengan adanya keterlibatan atasan dalam kemajuan organisasi dan menyediakan sumber daya yang diperlukan maka akan dapat menentukan keberhasilan penerapan suatu sistem, sehingga jika suatu organisasi dalam penerapan sistem tidak adanya dukungan atasan maka tujuan tersebut tidak akan tercapai .
4. Kegunaan sistem akuntansi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sistem akuntansi sangat diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam pelaporan keuangan dan dapat dijadikan pedoman dalam menyajikan informasi yang diperlukan berbagai pihak untuk berbagai kepentingan (*general purposes financial statements*), karena sistem akuntansi memberikan landasan tentang prosedur, teknik, dan metode yang layak untuk merekam segala peristiwa penting kegiatan pemerintah.

Selanjutnya disarankan bagi penelitian selanjutnya untuk dapat memasukkan variable tambahan seperti *Good governance*, transparansi, rencana strategis sebagai variable penelitian. Alasan yang dapat dibangun darinya adalah akuntabilitas dan transparansi dari Pemerintah merupakan prasyarat bagi terciptanya birokrasi dan pemerintah yang responsif terhadap kehendak rakyat. Penegasan akan pentingnya akuntabilitas dan transparansi guna memastikan pemanfaatan sumber daya yang terbatas untuk berbagai pelayanan publik yang dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat dengan cara yang efisien, efektif, dan terukur kinerjanya. Akuntabilitas instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan dari rencana strategis Pemerintah mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- A.Khan,Sanji.Albert,L.,and Dinesh.2013.*Top Management Support,Collective Mindfulness, and Information Systems Performance*. Journal of International Technology and Information Management, volume.22.
- Aditya Putranto. 2014.*Pengaruh Keperilakuan Organisasi Terhadap Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Di Pemerintah Kota Surakarta*. Jurnal Surakarta
- Caecilia Henny Dan Samuel .2015. *Faktor Keperilakuan Organisasi Terhadap Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dengan Konflik Kognitif Sebagai Variabel Intervening Di Kabupaten Merauke* . Jurnal Merauke

- Cyntia, Carolina. 2013. *Pengaruh Kejelasan Tujuan dan Dukungan Atasan Terhadap Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (Pada Dinas Pemerintah Kota Padang)*. Universitas Negeri Padang
- Diana, N. 2012. *Pengaruh Faktor Keperilakuan Organisasi Terhadap Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan daerah*. Universitas Bung Hatta, Padang.
- Eko, Widodo Suparno. 2015. *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR
- Erlina, Rambe Omar Sakti, Rasdianto. 2015. *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual Berdasarkan PP NO 71 TAHUN 2010 DAN PERMENDAGRI NO. 64 TAHUN 2013* Jakarta: Salemba Empat
- Hendra Santa dan Eka Damayanthi. 2018. *Pengaruh Pelatihan, Dukungan Manajemen Puncak, Kejelasan Tujuan, Kemampuan Teknik Personal Pada Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi*. Jurnal. Bali
- Mahmudi. 2016. *Analisa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta. YPKN
- Nanda Rakhmata Sari. 2017. *Pengaruh Kejelasan Tujuan, Dukungan Atasan Dan Pelatihan Terhadap Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dengan Konflik Kognitif Dan Konflik Afektif Sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir)*. jurnal. Universitas Riau Pekanbaru
- Naqvi, M. S., & Bashir, N. (2015). *IT-expert retention through organization commitment: A study of public sector information technology professional in pakistan*. Applied Computing and Informatics.
- Wibowo, 2016. *Manajemen Kinerja*, Edisi Kelima, PT. Rajagrafindo Persada Jakarta-14240.
- Yulistia, Yanti, Purwasih. 2017. *Analisis Faktor Keperilakuan Organisasi Terhadap Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Di Badan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat*. Jurnal. Padang
- Zahro, Shoffiyatuz *Pengaruh Faktor Keperilakuan Organisasi Dalam Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah ( Studi Kasus Instansi Pemerintah Se- Kota Madiun)*. Jurnal. Madiun Jawa Timur
- Permendagri No 21 Tahun 2016 Pasal 23 Ayat 1 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Permendagri No 59 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah